

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Awal dekade 1960-an merupakan periode krusial dalam panggung sejarah global yang ditandai oleh eskalasi puncak Perang Dingin serta kompetisi teknologis tingkat tinggi melalui Perlombaan Antariksa (*Space Race*) antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Penguasaan terhadap teknologi kedirgantaraan pada masa ini tidak lagi dipandang sekadar sebagai capaian ilmiah murni, melainkan telah bergeser maknanya menjadi instrumen politik utama serta tolok ukur supremasi, modernitas, dan prestise suatu bangsa di mata dunia (Alfauzi et al., 2024). Momentum kedirgantaraan global ini sebenarnya telah terakselerasi sejak dicanangkannya Tahun Geofisika Internasional (*International Geophysical Year*) pada rentang tahun 1957–1958, yang memicu penyelidikan intensif alam semesta dan memunculkan fenomena "demam antariksa" hingga ke belahan bumi selatan. Di tengah konstelasi global yang kompetitif inilah, mesin negara dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan cepat agar Indonesia mendapatkan panggung strategis untuk memosisikan diri sebagai kekuatan baru yang diperhitungkan, terutama melalui langgam diplomasi konfrontasi di antara blok negara-negara berkembang atau *New Emerging Forces* (Ricklefs, 2008). Dalam konteks pertarungan geopolitik antara *New Emerging Forces* (NEFO) dan *Old Established Forces* (OLDEFO), teknologi peroketan tidak lagi dipandang murni sebagai instrumen keilmuan. Bagi Presiden Soekarno, penguasaan antariksa memiliki karakteristik teknologi guna ganda (*dual-use technology*). Basis teknologi roket yang digunakan untuk membawa kapsul eksperimen saintifik pelacak cuaca (*sounding rocket*) pada dasarnya memiliki cetak biru pendorong yang sama dengan roket pembawa hulu ledak jarak jauh antarbenua (Fadeli, 2021).

Dinamika global tersebut berkelindan erat secara harmonis dengan visi geopolitik makro yang digagas oleh Presiden Soekarno di dalam negeri. Dalam iklim politik Demokrasi Terpimpin yang sentralistik, Soekarno secara sadar menempatkan penguasaan sains dan teknologi mutakhir sebagai salah satu instrumen utama kekuatan nasional (*instrument of national power*) yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan kemandirian nasional yang sejati (Kristiyanto,

2020). Kesadaran kolektif ini ditegaskan secara visioner oleh Soekarno dalam pidatonya di Bandung pada 25 Januari 1960 yang memaklumkan bahwa tahapan revolusi dunia kelima adalah "revolusi luar angkasa" (Rundjan, 2019). Pada level operasional, fondasi dasar penerbangan yang sebelumnya telah dirintis dengan susah payah oleh Marsekal Suryadarma menjadi batu pijakan yang krusial. Ambisi besar kepresidenan ini kemudian bersinggungan langsung dengan realitas doktrin pertahanan di bawah kepemimpinan Laksamana Udara Omar Dhani, yang tengah gencar melakukan modernisasi alutsista Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) secara besar-besaran. Kemerdekaan gerak dan perlindungan dari payung militer inilah yang melahirkan rasa percaya diri nasional yang kuat, sebagaimana digelorakan Soekarno bahwa bangsa Indonesia kini "ber-missiles dan ber-rocket"(Soekarno, 1965).

Eksistensi kelembagaan kedirgantaraan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan struktur birokrasi yang bergerak dari fase rintisan non-formal menuju legalitas hukum formal. Embrio organisasi ini bermula dari restrukturisasi fungsi Dewan Penerbangan tahun 1955. Di titik inilah Marsekal Muda R.J. Salatur tampil sebagai arsitek intelektual yang visioner dengan membidani lahirnya Panitia Astronautika pada tahun 1962 (Zainsam & Erina, 2015). Penyatuan visi kemudian mewujudkan nyata melalui pendirian Proyek Roket Ilmiah dan Militer Awal (PRIMA) pada akhir tahun 1963, yang mengawinkan kepakaran akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan kekuatan taktis AURI (Soeparno, 2004). Keberhasilan PRIMA mengeksekusi peluncuran roket ilmiah pertama buatan mandiri, Kartika-I, pada 14 Agustus 1964 menjadi bukti empiris keberhasilan langkah awal tersebut.

Momentum historis ini menjadi dasar legitimasi bagi Presiden Soekarno untuk meresmikan wadah permanen birokrasi sains kedirgantaraan melalui penerbitan Keputusan Presiden Nomor 236 Tahun 1963 tentang Pembentukan Lembaga Penerbangan dan Angkasaluar Nasional pada 27 November 1963. Langkah yuridis ini menandai transisi mutlak dari sebuah kepanitiaan eksperimental *ad-hoc* menjadi instansi pemerintah yang definitif. Puncak kepaduan barisan dari lembaga baru ini akhirnya paripurna ketika Komodor Udara Nurtanio Pringgoadisuryo dipercaya memegang tampuk kepemimpinan sebagai Direktur Jenderal pertama, berdasarkan surat rekomendasi langsung dari Omar Dhani (Arsip

Nasional Republik Indonesia, 1963b).

Sebagai sebuah lembaga yang baru dilahirkan, keberlangsungan awal Lembaga Penerbangan dan Angkasaluar Nasional sangat ditopang oleh jalinan aliansi antara elite teknokrat sipil dan pimpinan militer dirgantara. Peran kunci ini digerakkan oleh trio tokoh perintis, yakni Marsekal Suryadarma selaku peletak dasar wadah penerbangan awal, Marsekal Muda R.J. Salatun sebagai arsitek intelektual pembentukan kepanitiaan, serta Komodor Udara Nurtanio Pringgoadisuryo yang memegang kemudi eksekutif. Patronase birokrasi dan perlindungan politik makro ini berhasil memfasilitasi lembaga dalam menjalin jaringan kerja sama internasional, seperti alih teknologi roket ilmiah seri Kappa-8 dari Jepang (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 1963). Kendati kerja sama ini sempat memantik radar kecemasan intelijen Blok Barat terhadap potensi penyalahgunaan teknologi ganda (*dual-use technology*), hal tersebut dijawab lewat keberhasilan swadaya insinyur domestik dalam mendirikan infrastruktur masif Stasiun Peluncuran Pameungpeuk yang murni ditujukan bagi riset damai (Berita Yudha, 1965).

Namun, akselerasi pembentukan lembaga yang sangat progresif di awal pendiriannya ini menyimpan celah kerentanan struktural yang besar. Tingkat ketergantungan lembaga yang tinggi pada perlindungan tunggal Presiden Soekarno serta dukungan logistik dari matra militer AURI memunculkan sebuah paradoks mengenai sejauh mana lembaga ini benar-benar sanggup berdiri sendiri sebagai institusi sipil. Kondisi tersebut memicu ketidakpastian yang krusial ketika badai turbulensi politik nasional meletus pasca-peristiwa G30S di penghujung tahun 1965 yang meruntuhkan rezim Soekarno dan memojokkan posisi elite birokrasi AURI (Hughes, 2002). Krisis ini diperparah oleh tragedi internal berupa kecelakaan pesawat di Bandung yang menewaskan Direktur Jenderal pertama, Komodor Udara Nurtanio Pringgoadisuryo pada 21 Maret 1966 (Soeparno, 2004). Kombinasi runtuhnya payung politik makro dan gugurnya pimpinan teknis utama di lapangan ini menjadi ujian paling berat bagi lembaga untuk bertahan menghadapi transisi kekuasaan, yang pada akhirnya membawa agenda riset peroketan nasional berada pada fase stagnasi di akhir era Demokrasi Terpimpin.

Meskipun fase rintisan dan kejatuhan awal Lembaga Penerbangan dan

Angkasaluar Nasional memiliki kedudukan strategis dalam lembaran sejarah sains nasional, kajian historiografi yang membedah tema ini secara khusus masih menyisakan celah riset (*research gap*) yang nyata. Penelitian terdahulu yang diproduksi oleh Moedji Soedjarwo cenderung berfokus pada kronologi teknis peroketan secara umum (Soedjarwo, 2010), sementara kajian Alfauzi dkk. menitikberatkan pada aspek perkembangan kelembagaan jangka panjang yang bersifat makro-deskriptif (Alfauzi et al., 2024). Di sisi lain, buku babon seperti *Sang Perintis* garapan Handoko F. Zainsam dan Reni Erina memiliki batasan fokus spasial dan temporal yang mendominasi aktivitas fisik fasilitas kedirgantaraan di Rumpin, Bogor, pada masa Orde Baru (Zainsam & Erina, 2015). Sejauh penelusuran penulis, belum ada penelitian sejarah kelembagaan yang memfokuskan lensa naratifnya secara ketat untuk membedah fase rintisan, proses pembentukan formal, hingga masa krisis institusi ini pada batasan tahun 1962 hingga 1967. Penelitian sejarah ini hadir untuk mengisi celah historiografi tersebut, hingga dituangkan ke dalam sebuah skripsi yang berjudul: “Perkembangan Kelembagaan Lembaga Penerbangan Dan Angkasaluar Nasional (LAPAN) Tahun 1962–1967”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini terarah, mendalam, dan tidak melebar dari fokus kajian sejarah kelembagaan, penulis menetapkan pembatasan masalah secara temporal (waktu) dan spasial (tempat).

Secara temporal (waktu), penelitian ini dibatasi pada kurun waktu 1962 hingga 1967. Pemilihan tahun 1962 sebagai titik awal didasarkan pada data historis pembentukan embrio kelembagaan kedirgantaraan secara terstruktur. Fase ini ditandai dengan pengesahan Panitia Astronautika pada 31 Mei 1962 (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1963). Langkah rintisan ini kemudian diperkuat oleh pembentukan Proyek Roket Ilmiah dan Militer Awal (PRIMA) pada tahun yang sama, hingga akhirnya memuncak pada pengesahan Lembaga Penerbangan dan Angkasaluar Nasional sebagai badan definitif pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 236 Tahun 1963 (Arsip Nasional Republik Indonesia, 1963a).

Adapun tahun 1967 ditetapkan sebagai batas akhir penelitian karena tahun tersebut merupakan titik kulminasi transisi politik yang mengakhiri era Demokrasi Terpimpin, yang secara langsung mencabut payung pelindung politik institusi kedirgantaraan ini (Ricklefs, 2008). Berakhirnya periode ini juga didukung oleh data keras mengenai rentetan masalah yang melumpuhkan lembaga, mulai dari hancurnya fasilitas radar peluncuran di Pameungpeuk akibat angin puyuh pada 14 Februari 1966, hingga wafatnya sang pemimpin sentral, Direktur Jenderal pertama Komodor Udara Nurtanio Pringgoadisuryo, dalam kecelakaan pesawat di Bandung pada 21 Maret 1966 (Zainsam & Erina, 2015).

Secara spasial (tempat), penelitian ini difokuskan di wilayah Jakarta dan Jawa Barat (khususnya Bandung dan Pameungpeuk, Garut). Jakarta dipilih karena posisinya sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat birokrasi dan tempat dirumuskannya berbagai payung hukum pembentukan lembaga, termasuk terbitnya Keputusan Presiden Nomor 250 Tahun 1963 tentang pengangkatan pimpinan lembaga (Arsip Nasional Republik Indonesia, 1963b). Sementara itu, Bandung dan Pameungpeuk di Jawa Barat merupakan basis perakitan teknis dan stasiun peluncuran roket tempat dieksekusinya berbagai program kedirgantaraan yang digerakkan oleh AURI dan kalangan akademisi (Alfauzi et al., 2024).

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini diarahkan ke dalam bentuk penelitian deskriptif-naratif yang difokuskan pada proses kesejarahan kelembagaan secara runtut. Oleh karena itu, perumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan utama:

- a. Bagaimana proses rintisan dan pembentukan Lembaga Penerbangan dan Angkasaluar Nasional (LAPAN) dari wujud kepanitiaan awal hingga peluncuran roket pertama pada kurun waktu 1962–1965?
- b. Bagaimana kondisi dan transformasi struktural Lembaga Penerbangan dan Angkasaluar Nasional (LAPAN) saat menghadapi transisi politik Orde Baru dan krisis internal pada kurun waktu 1965–1967?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengkaji dan merekonstruksi secara historis proses rintisan dan pembentukan Lembaga Penerbangan dan Angkasaluar Nasional dari wujud kepanitiaan awal hingga menjadi instansi definitif pada kurun waktu 1962 hingga 1965.
- b. Untuk menganalisis perkembangan dan kondisi Lembaga Penerbangan dan Angkasaluar Nasional ketika menghadapi kemelut transisi politik serta hilangnya figur pemimpin teknis utama pada periode 1965 hingga 1967.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara akademik bagi penulis dan pembaca tentang pasang-surut pelembagaan institusi sains negara, sebagai referensi tambahan dalam penelitian mengenai sejarah kedirgantaraan di Indonesia ataupun penelitian bertema serupa, khususnya mengenai fase rintisan, proses pembentukan formal, hingga masa krisis Lembaga Penerbangan dan Angkasaluar Nasional. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memahami perjalanan institusi kedirgantaraan definitif pertama di Indonesia, sekaligus memperkaya studi historiografi kelembagaan, sains, dan teknologi di tanah air.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dan refleksi historis bagi instansi terkait masa kini (seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN) dalam memahami rekam jejak, fondasi historis, serta pentingnya ketahanan struktur birokrasi dalam merawat sebuah lembaga strategis negara saat menghadapi guncangan politik. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literatur dalam perpustakaan lembaga terkait dan perguruan tinggi, serta menjadi panduan bagi mahasiswa sejarah lainnya.

D. Kerangka Analisis

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan deskriptif-analitis. Untuk membedah transformasi pembentukan hingga fase transisi operasional Lembaga Penerbangan dan Angkasaluar Nasional (LAPAN) dari era Orde Lama menuju Orde Baru, penelitian ini menggunakan pisau analisis Teori Pelembagaan Politik (Political Institutionalization) yang dikemukakan oleh Huntington (1968).

Huntington menekankan bahwa ketidakstabilan sebuah tatanan sering kali terjadi akibat cepatnya perubahan sosial dan politik yang tidak diimbangi oleh kematangan lembaga-lembaga atau institusi negara di dalamnya. Kekuatan dan daya tahan sebuah institusi negara dapat diukur melalui empat parameter pelembagaan, yaitu:

Adaptabilitas (Kemampuan Menyesuaikan Diri): Merupakan tolok ukur sejauh mana sebuah organisasi mampu bertahan hidup, memulihkan diri, dan merespons tantangan dari lingkungan eksternal tanpa kehilangan identitas utamanya. Dalam penelitian ini, adaptabilitas LAPAN diukur melalui kapasitas menyesuaikan diri serta ketahanan organisasinya untuk memulihkan diri (*recovery*) dari hantaman krisis. Kemampuan ini diuji secara ekstrem ketika payung perlindungan politik makro rezim Demokrasi Terpimpin runtuh pasca-peristiwa Gerakan 30 September 1965, yang kemudian diikuti oleh pembekuan anggaran operasional akibat kebangkrutan ekonomi makro serta kehancuran fisik fasilitas stasiun lapangan.

Kompleksitas (Kerumitan Struktur): Berkenaan dengan sejauh mana sebuah organisasi memiliki diferensiasi fungsi, hierarki yang teratur, dan spesifikasi unit kerja yang mandiri. Variabel kompleksitas ini digunakan untuk menganalisis apakah pembagian kerja di jajaran kedirekturan kolektif LAPAN telah berjalan secara mandiri dan *impersonal*, atau justru memiliki kerentanan struktural akibat ketergantungan yang terlampau absolut pada figur pelindung tunggal maupun komando taktis militer matra udara.

Otonomi (Kemandirian): Mengukur tingkat kemandirian lembaga dalam melindungi prosedur kerja, keputusan operasional, dan perekrutan anggotanya dari

intervensi kelompok kepentingan atau pengaruh politik luar. Parameter otonomi ini menjadi instrumen penting untuk meneliti batas pemisahan antara status hukum LAPAN sebagai lembaga sipil negara non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 236 Tahun 1963, dengan realitas operasionalnya di lapangan yang secara teknis disokong penuh oleh jalur logistik militer Angkatan Udara.

Koherensi (Keterpaduan Internal): Merupakan tingkat kesatuan, konsensus, dan kerja sama di antara para anggota dari berbagai unsur di dalam tubuh organisasi tersebut. Melalui variabel koherensi ini, fakta historis mengenai pasang-surut hubungan kolaborasi lintas sektoral antara teknisi militer Depot Elektronika AURI Bandung dengan barisan intelektual sipil dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) dapat dianalisis secara objektif. Variabel ini secara spesifik akan membedah tingkat keterpaduan tersebut, terutama ketika iklim saling curiga akibat operasi *skrining* ideologi mulai melanda ruang laboratorium antariksa nasional pasca-akhir tahun 1965.

Keempat parameter ini secara tajam digunakan sebagai alat bedah (kerangka analisis) untuk merekonstruksi sejarah kelembagaan LAPAN secara struktural. Penggunaan teori ini akan mengarahkan penelitian untuk mengurai akar permasalahan terkait bagaimana LAPAN yang pada kurun waktu 1962–1965 sukses meluncurkan roket Kartika-I, kemudian mengalami pasang-surut organisasional pada era transisi 1966–1967. Pendekatan ini secara spesifik digunakan untuk menguji sejauh mana perubahan rezim kekuasaan, krisis ekonomi, dan pergantian kepemimpinan memengaruhi tingkat ketahanan serta kemandirian institusi sains tersebut.

E. Metode dan Bahan Sumber

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian sejarah atau historis yang di dalamnya akan menelusuri secara mendalam rekam jejak Lembaga Penerbangan dan Angkasaluar Nasional selama rentang waktu 1962–1967. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Secara metodologis, penulis menerapkan kerangka kerja Louis Gottschalk yang terdiri dari empat tahapan utama, yakni heuristik, verifikasi (kritik sumber), interpretasi, dan historiografi (Gottschalk, 1975).

Tahapan pertama dalam penelitian sejarah ini adalah heuristik, yakni sebuah proses pelacakan, pencarian, dan pengumpulan jejak-jejak masa lampau yang relevan dengan fokus kajian. Sesuai dengan kaidah keilmuan, sumber-sumber dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua jenis, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Penulis secara proaktif mengkaji dan menghimpun berbagai sumber autentik peninggalan masa Demokrasi Terpimpin seputar embrio dan transformasi institusi kedirgantaraan. Sumber primer utama yang digunakan meliputi dokumen-dokumen resmi kenegaraan yang ditelusuri langsung di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Dengan memanfaatkan Inventaris Arsip Tekstual Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) 1950-2002, penulis berhasil menemukan dan mengakses dokumen hukum esensial yang menjadi landasan pembentukan lembaga, seperti Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 1963, Keputusan Presiden Nomor 236 Tahun 1963, serta Keputusan Presiden Nomor 250 Tahun 1963.

Selain sumber primer, penulis juga memanfaatkan sumber sekunder sebagai penunjang mutlak untuk membangun konteks historis yang komprehensif. Sumber sekunder tersebut meliputi berbagai literatur seperti buku babon sejarah, jurnal ilmiah tingkat nasional maupun internasional, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus kajian. Beberapa contoh literatur sekunder yang digunakan antara lain adalah kajian mengenai konstelasi politik militer era Demokrasi Terpimpin (seperti karya Harold Crouch dan Ulf Sundhaussen), serta penelusuran historiografi kelembagaan seperti buku Sang Perintis. Penelusuran sumber sekunder ini berfungsi untuk mempertajam pisau analisis dan membandingkan temuan arsip primer dengan narasi sejarah yang sudah mapan.

Tahapan kedua adalah verifikasi atau kritik sumber, yang bertujuan untuk menguji orisinalitas dan kredibilitas data yang telah dikumpulkan. Tahapan ini terbagi secara ketat menjadi dua instrumen, yakni kritik eksternal dan kritik internal. Pada tahap kritik eksternal, penulis memverifikasi keaslian fisik arsip-arsip kenegaraan dan surat kabar. Mengingat seluruh arsip primer yang dirujuk dalam penelitian ini didapatkan dan diakses secara langsung dari lembaga pelestari resmi negara, yakni Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), maka legalitas material, usia kertas, cap

stempel, maupun keabsahan fisik sumber-sumber tersebut secara mutlak telah terjamin dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

Sementara itu, pada tahap kritik internal, penulis melakukan pengujian mendalam terhadap kredibilitas isi atau informasi yang terkandung di dalam sumber-sumber tersebut. Proses ini dilakukan dengan metode persilangan data (*cross-checking*), di mana penulis membandingkan kesesuaian pernyataan dari satu dokumen dengan dokumen lainnya. Sebagai contoh, penulis menyilangkan informasi hukum dari lembar konsideran Keputusan Presiden Nomor 250 Tahun 1963 yang memuat rekomendasi Laksamana Udara Omar Dhani dengan peliputan media massa kontemporer mengenai progres peroketan, atau membandingkan data peluncuran roket dengan catatan dari Buku Biografi Nurtanio. Melalui perbandingan komparatif ini, penulis kemudian menarik sebuah sintesis kesimpulan yang paling logis, objektif, dan rasional untuk dijadikan sebagai bangunan fakta sejarah yang utuh.

Tahapan ketiga adalah interpretasi atau penafsiran. Dalam menginterpretasi fakta-fakta yang telah terverifikasi, penulis dituntut untuk bersikap seobjektif mungkin agar hasil penafsiran meminimalisasi bias sejarah. Interpretasi dilakukan dengan menganalisis berbagai referensi yang telah dikumpulkan—seperti sumber arsip primer, literatur biografi, dan jurnal ilmiah—untuk menyatukan rentetan data yang berserakan menjadi satu kesatuan fakta historis yang bermakna. Sebagai contoh, dengan memanfaatkan pisau analisis ini, penulis menafsirkan secara historis bagaimana manuver tokoh-tokoh perintis seperti Marsekal Suryadarma, Marsekal Muda R.J. Salatun, dan Komodor Udara Nurtanio Pringgoadisuryo dalam merespons konstelasi Perang Dingin, meningkatkan kerumitan birokrasi kedingantaraan, menjaga kewenangan lembaganya di bawah payung perlindungan Laksamana Udara Omar Dhani, hingga akhirnya menghadapi masa stagnasi akibat kemelut transisi politik.

Setelah melewati proses interpretasi, penulis akan melanjutkan penelitian ke tahap akhir, yaitu historiografi atau penulisan sejarah. Dalam tahap ini, penulis menyusun hasil sintesis penelitian secara kronologis dengan pendekatan deskriptif-analitis yang dituangkan ke dalam bentuk karya ilmiah skripsi. Secara garis besar, penulisan sejarah ini terbagi menjadi tiga bagian utama: pendahuluan, pembahasan,

dan penutup. Pada bagian pendahuluan, penulis menjabarkan dasar pemikiran, permasalahan, tujuan, kerangka analisis, serta metode dan bahan sumber penelitian. Pada bagian pembahasan, diuraikan hasil penelitian kesejarahan mengenai proses rintisan hingga pembentukan Lembaga Penerbangan dan Angkasaluar Nasional yang ditulis secara objektif, runtut, dan dapat dipertanggungjawabkan isinya melalui dukungan bukti arsip dan literatur yang tepercaya. Lalu, bagian penutup berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang merupakan jawaban historis atas rumusan masalah, temuan-temuan penting, keterbatasan penelitian, serta saran dan rekomendasi untuk penelitian lanjutan di bidang sejarah kedirgantaraan.

